

PENTINGNYA GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA SDN 41 BUTON

Madi¹, Sulasri²

^{1 2}Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Buton

Korespondensi: madiumb12@gmail.com; sulasri.faiumbfai@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pentingnya Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhadap motivasi belajar siswa SD Negeri 41 Buton. Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai penyelenggara pemerintahan baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dalam proses pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui data-data kepustakaan. Dalam analisis data, menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni memaparkan data secara tertulis mengenai data-data yang terkait dengan objek penelitian yang ada di SD Negeri 41 Buton, baik melalui pengamatan, wawancara tentang keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sangat dibutuhkan pada SD Negeri 41 Buton; 2) Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki kemampuan dalam memotivasi siswa dalam belajar; 3) Salah satu bentuk motivasi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah senantiasa memberikan penghargaan serta pujian terhadap siswa yang mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, memberikan tugas mandiri dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Guru; Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Motivasi Belajar Siswa

ABSTRACT

This study discusses the importance of Government Employee Teachers with Work Agreements (PPPK) on the learning motivation of SD Negeri 41 Buton students. Government Employee Teachers with Work Agreements (PPPK) are part of the State Civil Apparatus (ASN), as government administrators, both central, provincial and district/city governments. This research is a qualitative research, in the process of collecting data using the method of observation, interviews and documentation. The data needed in this study are primary data, namely data obtained from observations, interviews and secondary data, namely data obtained through library data. In data analysis, using qualitative descriptive analysis techniques, namely presenting data in writing regarding data related to the research object in SD Negeri 41 Buton, either through observation, interviews about the actual situation. The results of the study show that: 1) Government Employee Teachers with Work Agreements (PPPK), are very much needed at SD Negeri 41 Buton; 2) Government Employee Teachers with Work Agreements (PPPK) have the ability to motivate students in learning; 3) One form of motivation for Government Employee Teachers with Work Agreements (PPPK) is to always give awards and praise to

students who are able to answer questions properly and correctly, provide independent assignments and so on.

PENDAHULUAN

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) maka pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) membuka peluang kalangan profesional untuk menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara dengan sistem perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). "Dalam Pasal 1 pada bab ketentuan umum menjelaskan bahwa Manajemen program pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme."¹ Juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pada pasal 3 tentang manajemen PPPK meliputi:

1. "Penetapan kebutuhan
2. Pengadaan.
3. Penilaian kinerja.
4. Penggajian dan tunjangan.
5. Pengembangan kompetensi.
6. Pemberian penghargaan.
7. Disiplin.
8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
9. Perlindungan".²

Dari uraian diatas jelas bahwa guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sama dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), melalui formasi kebutuhan dari masing-masing daerah termasuk tahapan penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, penghargaan termasuk pemutusan hubungan kerja serta perlindungan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPK). "Penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dilakukan berdasarkan kebutuhan jumlah serta jenis jabatan PPPK pada setiap instansi pemerintah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Kebutuhan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN".³

Dapat disimpulkan bahwa penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dilaksanakan per 1 tahun untuk jangka waktu 5 tahun

¹Salinan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 49 Tahun 2018, Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, (2018), h.2

² *Ibid.* h.5

³ *Ibid.* h.6

dengan ketetapan surat keputusan Menteri dengan mempertimbangkan secara teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 7 dilakukan melalui tahapan:

1. "Perencanaan
2. Pengumuman lowongan
3. Pelamaran
4. Seleksi
5. Pengumuman hasil seleksi
6. Pengangkatan menjadi PPPK".

Pengadaan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja yang dilaksanakan berdasarkan pada tahapan perencanaan, pengumuman, pendaftaran sampai pada tahap pengangkatan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). SDN 41 Buton yang merupakan salah satu lembaga pendidikan formal tingkat dasar pada wilayah Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton juga pengelola serta penyelenggara pendidikan. Dimana pendidikan adalah pandangan yang menempatkan pendidik sebagai gejala individual di satu pihak dan pandangan yang menempatkan gejala sosial atau kebudayaan di lain pihak. Pendidikan merupakan kebutuhan bagi pengembangan potensi dasar yang dimiliki manusia. "Berdasarkan undang-undang sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS), menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara."⁴

Dari uraian tersebut penulis menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu kegiatan sadar yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya serta memiliki kecerdasan, keterampilan, akhlak mulia sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara serta agama.

Kemudian dalam arti yang lain pendidikan diartikan sebagai proses pewarisan nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian maka fungsi fundamental yang harus dijalankan oleh lembaga pendidikan adalah menyediakan suatu suasana yang kondusif bagi pengembangan hidup manusia sebagai peserta didik sehingga dalam kehidupan sesungguhnya dapat berinteraksi secara baik dengan sesama peserta didik, guru atau tenaga pendidik, orang tua serta lingkungan sekitarnya.

Pembangunan di bidang pendidikan atas dasar falsafah Negara pancasila diarahkan untuk membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tanggung jawab, tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa: "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

⁴Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2003

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab".⁵

Berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia harus menjadi orang yang cerdas karena dengan kecerdasan akan mampu membangun bangsanya, masyarakat serta agama juga masyarakat Indonesia harus sehat jasmani dan rohani, bertakwa kepada Allah SWT, mandiri dan bertanggung jawab. Untuk itu guru tidak hanya berperan sebagai satu-satunya sumber belajar yang bertugas menuangkan materi pelajaran kepada siswa, akan tetapi yang lebih penting adalah guru memfasilitasi agar siswa termotivasi untuk belajar.

Sejalan dengan hal diatas Wina Sanjaya mengemukakan beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang guru:

1. "Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum memulai kegiatan pembelajaran;
2. Guru dan siswa secara bersama-sama menyusun tugas-tugas belajar;
3. Guru memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan;
4. Guru memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang memerlukannya;
5. Guru memotivasi siswa untuk belajar, membimbing dan lain-lain melalui pertanyaan yang diajukan.
6. Guru bersama-sama siswa menarik suatu kesimpulan pembelajaran".⁶

Dengan demikian guru sebelum memulai kegiatan pembelajarannya maka guru terlebih dahulu merumuskan tujuan pembelajaran serta menginformasikan tentang tugas-tugas yang akan dilakukan oleh siswa sampai pada sebuah kesimpulan.

Hal ini sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sosial budaya menetapkan bahwa, dengan meningkatkan dan meluasnya pembangunan maka kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial masyarakat dapat terwujud sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945. Untuk menanamkan dan mengamalkan hal-hal tersebut kepada siswa SD. Negeri 41 Buton guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), memegang peranan penting untuk memberikan pengertian betapa pentingnya pengetahuan itu untuk dimiliki oleh setiap individu karena dengan ilmu pengetahuan pulalah seseorang dapat mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini untuk perlu siswa SD Negeri 41 Buton sedini mungkin digairahkan untuk lebih giat belajar.

Oemar Hamalik, menyebutkan bahwa "Motivasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi siswa dalam meningkatkan motivasi belajarnya. Ada beberapa langkah guru dalam membangkitkan motivasi belajar siswa yakni: "1) Memberi angka, 2) Pujian, 3) Hadiah, 4) Kerja kelompok, 5) Persaingan, 6)

⁵ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2003

⁶ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, (Cet. 2 : Jakarta; Prenada Media Group, 2009), h.185

Tujuan dan level of aspiration, 7) Sarkasme, 8) Penilaian, 9) Karyawisata dan eskursi, 10) Film pendidikan, 11) Belajar melalui radio".⁷

"Sardiman A.M mengatakan bahwa motivasi yang berawal dari kata motif dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan/mendesak".⁸ Mc. Donald mengatakan bahwa "motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan."⁹

Dari penjelasan ahli tersebut dapat di simpulkan bahwa motivasi merupakan dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu, dan bila tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu sehingga motivasi itu dapat terangsang oleh faktor dari luar tetapi motivasi itu sendiri tumbuh didalam diri seseorang. Namun dalam kegiatan belajar motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikann arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Dikatakan keseluruhan karena pada umumnya ada beberapa motif yang bersama-sama menggerakkan siswa untuk belajar.

Sardiman A.M., Menyebutkan bahwa: "Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non intelektual. Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar."¹⁰

Dengan demikian guru yang senantiasa memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar berarti menggerakkan siswa untuk melakukan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu dan akhirnya siswa termotivasi untuk belajar karena merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan.

Davis dalam Syafaruddin dan Irwan Nasution mengatakan bahwa motivasi terdidri atas 2 (dua) bagian :

1. Motivasi intrinsik yakni motivasi yang bersumber dari faktor dalam diri siswa. Motivasi intrinsik merupakan pendorong bagi aktivitas dalam pengajaran dan dalam pemecahan soal;
2. Motivasi Ekstrinsik yaitu motivasi yang bersumber dari faktor luar diri siswa. Motivasi ekstrinsik dapat berupa penghargaan, pujian, hukuman dan celaan.¹¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu aktifitas yang muncul dari dalam diri seorang siswa dan guru atau dari luar diri seorang siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran, baik berbentuk penghargaan, pujian, sanksi maupun celaan. Selain itu guru juga memiliki hubungan yang sangat penting dengan siswa dalam kegiatan belajar karena guru

⁷ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Cet. 9: Jakarta; Bumi Aksara, 2009), h. 167

⁸ Sardiman, A.M. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Cet.23; Jakarta, Rajawali Pers. 2016), h.73

⁹ Mc. Donald dalam Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Cet.9; Jakarta, Bumi Aksara. 2009), h.158.

¹⁰ Sardiman, A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Cet.23; Jakarta, Rajawali Pers. 2016), h.75

¹¹ Davis dalam Syafaruddin dan Irwan Nasution, *Manajemen Pembelajaran*, (Cet. 1; Jakarta, Quantum Teaching, 2005), h.132

mampu melakukan usaha-usaha untuk dapat menumbuhkan dan memberikan motivasi agar siswa mampu melakukan aktivitas belajar dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini dilakukan dengan memilih informasi secara cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Informan terpilih merupakan individu yang berhubungan, mempunyai kepentingan atau pengetahuan mengenai judul penelitian ini sehingga diharapkan mampu memberikan informasi untuk menjawab pertanyaan peneliti. Instrumen yang penulis pergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pedoman wawancara ini, penulis pergunakan sebagai panduan dalam mewawancarai informan untuk memperoleh data yang valid. Pedoman wawancara ini berisi sejumlah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat sesuai dengan hasil penelitian.

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui data kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pentingnya guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), pada SD Negeri 41 Buton

Dalam waktu kurang lebih 15 (lima belas), tahun pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan pengelolaan pegawai pemerintah atau Aparatur Sipil Negara (ASN) hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU Kepegawaian) diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).¹²

Dengan demikian Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang memasukan PPPK kedalam ASN merupakan angin segar bagi para guru honorer, guru tidak tetap atau guru bantu yang ada di SDN 41 Buton dimana mereka sudah bertahun-tahun mengabdikan dirinya sebagai guru honorer dengan gaji atau penghasilan yang sangat jauh dari apa yang di harapkan, namun para guru honorer atau guru bantu di SDN 41 Buton tetap semangat dan tulus memberikan ilmunya pada peserta didik tanpa menuntut apa-apa dari pemerintah atau sekolah.

Masria, S.Pd.SD. menjelaskan bahwa "pengangkatan serta penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah merupakan sesuatu yang amat penting bagi SD Negeri 41 Buton karena guru yang ada di sekolah ini hanya 3 (Tiga), orang PNS dan 4 (Empat), orang guru honorer atau guru tidak tetap dan 2 (dua), orang guru PPPK, sehingga dalam proses kegiatan belajar dan mengajar tidak efisien. Dengan kata lain masuknya PPPK dalam ASN diharapkan dapat mendorong percepatan atau akselerasi dalam menciptakan profesionalisme dan peningkatan kompetensi PNS."¹³

¹²Agustinus sulistyio, Tri Putranto, *Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pengertian dan Urgensinya*, 2015, h.1.

¹³Masria, S.Pd.SD, Kepala SDN 41 Buton, *Wawancara*, SDN.41 Buton, 14 Desember 2022

Dengan demikian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan solusi yang sangat penting bagi calon guru untuk menjadi guru PNS maupun guru PPPK yang di programkan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan guru pada SDN 41 Buton sehingga proses kegiatan belajar dan mengajar dapat terlaksana sesuai dengan harapan sekolah serta tujuan dari sistem pendidikan nasional.

Sejalan dengan ini Marfia, S.Pd.SD menjelaskan bahwa "Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), memberikan semangat baru bagi guru yang statusnya guru honorer, guru bantu ataupun guru tidak tetap dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik sekaligus pengajar bagi siswa/siswi SDN 41 Buton sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajarannya."¹⁴

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sama statusnya dengan ASN dalam kaitanya dengan perekrutan atau pengangkatan termasuk hak dan kewajibannya serta gaji sebagai pegawai pemerintah.

Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja semula masyarakat menganggap bahwa PPPK adalah pegawai kontrak atau pekerja honorer, pegawai tidak tetap, namun persepsi tersebut adalah keliru karena pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang sistem penerimaan dan pengangkatannya dilaksanakan oleh pemerintah.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Prasajo, bahwa "tujuan dari rekrutmen PPPK adalah untuk memperkuat basis profesionalisme dan kompetensi dalam penyelenggaraan birokrasi, yang diharapkan dapat mendorong percepatan atau akselerasi dalam menciptakan profesionalisme dan peningkatan kompetensi PNS. PPPK bukanlah PTT, honorer atau TTK yang berganti baju."¹⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang merupakan pegawai tidak tetap, pegawai honorer maupun guru bantu ternyata keliru karena PPPK merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara ASN yang di jamin oleh Undang-undang serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan di berhentikan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Pentingnya Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhadap motivasi belajar siswa SD Negeri 41 Buton

1. Memberikan Motivasi

Motivasi ialah suatu proses untuk memberikan semangat, arahan dan mengajak orang lain untuk tekun dalam berbuat suatu hal yang dapat mencapai tujuan. Memberi motivasi pada setiap siswa atau peserta didik agar dapat menumbuhkan energi yang positif yang menyebabkan terjadinya perubahan yang tampak pada perasaan, dan emosi anak.

¹⁴Marfia, S.Pd.SD, Guru PPPK, *Wawancara*, SDN 41 Buton, 14 Desember 2022

¹⁵Eko Prasajo, Jangan sampai PPPK dijadikan Alat Pendulang Suara Pemilu 2019, Seminar Manajemen PPPK, Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, 27 Mei 2015, diunduh dari <http://www.bkn.go.id/berita/prof-eko-prasajo-jangan-sampai-p3k-dijadikan-alat-pendulang-suara-pemilu-2019>.

Pemberian motivasi ini juga bisa meningkatkan semangat belajar siswa atau peserta didik pada semua mata pelajaran sehingga proses pembelajaran siswa atau peserta didik dapat meningkat.

"Sejalan dengan hal diatas Marfia, S.Pd menjelaskan bahwa salah satu strategi yang saya gunakan adalah memberikan motivasi kepada siswa agar terus semangat belajar meskipun sistem pembelajaran dengan waktu yang sangat terbatas untuk setiap pertemuannya, untuk bentuk motivasi yang saya lakukan misalnya dengan memberikan pujian atas meningkatnya motivasi belajar siswa yang mendapat nilai baik sehingga siswa yang belum mendapat nilai baik merasa termotivasi untuk terus belajar karena adanya apresiasi yang di berikan oleh guru."¹⁶

Hal yang senada disampaikan oleh siswa yang bernama La ode Azam menyatakan bahwa: "Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), memuji saya dan teman-teman setiap masuk kelas agar saya dan teman-teman sekelas termotivasi untuk selalu belajar. Setiap memulai pelajaran, guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selalu mengapresiasi berupa pujian pada setiap siswa yang mendapat nilai baik ataupun yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar yang di berikan guru sehingga saya selalu termotivasi untuk terus belajar agar dapat bersaing dengan teman-teman satu kelas."¹⁷

Dari penjelasan tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan motivasi yang diberikan oleh guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di saat memulai serta membuka kegiatan proses pembelajaran siswa termotivasi dalam menerima pelajaran baik dalam kelas maupun diluar kelas dan siswa senantiasa semangat untuk belajar.

2. Pemberian Tugas

Setiap mata pelajaran di batasi waktunya untuk melakukan proses belajar sehingga guru perlu strategi agar materi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan target yang di tetapkan salah satunya dengan pemberian tugas rumah untuk peserta didik, baik itu tugas hafalan maupun membuat ringkasan.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Ibu Siti Armila,S.Pd yang mengatakan bahwa:

"Sangat di perlukan strategi yang baik agar proses pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang di harapkan. Selain yang sudah saya sebutkan sebelumnya ada juga strategi yang saya lakukan untuk para siswa khususnya di kelas V ini sekolah kami memberi waktunya sangat terbatas untuk melakukan pembelajaran yaitu dengan memberikan tugas rumah kepada siswa. Hal ini di lakukan agar para siswa atau peserta didik khususnya di kelas V ini tidak hanya mengetahui di dalam kelas pada saat pembelajaran berlangsung tetapi juga bisa di ulang kembali pelajaran tersebut setelah siswa tiba di rumah. Selain itu tugas individu seperti ringkasan, tugas rumah juga di berikan mengingat waktu pembelajaran di sekolah di batasi untuk setiap pelajarannya sehingga dengan strategi

¹⁶ Marfia, guru PPPK SDN 41 Buton, *Wawancara*, SDN 41 Buton, 20 Desember 2022

¹⁷ La Ode Azam, Siswa SDN 41 Buton, *Wawancara*, SDN 41 Buton, 20 Desember 2022

tersebut bisa membuat siswa lebih memahami setiap materi yang di berikan dan hasil belajar yang di peroleh siswa bisa meningkat.¹⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan strategi pemberian tugas atau pekerjaan rumah pada siswa maka secara otomatis siswa bisa meningkat belajarnya dan dapat di pastikan akan memperoleh nilai atau hasil belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Hal ini di perkuat dengan pernyataan siswa atas nama Badrun yang mengatakan: "Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dalam memulai kegiatan pembelajaran senantiasa membuka dengan kata-kata motivasi berupa pujian, penghargaan terhadap siswa yang hadir tepat waktu selain itu guru juga memberikan kami tugas terutama tugas mata pelajaran yang sudah di sampaikan pada saat pembelajaran di dalam kelas agar memudahkan kami untuk selalu belajar, mengingat dan memperoleh nilai yang bagus."¹⁹

Dengan demikian guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), disaat memulai pelajaran senantiasa memberikan pujian dan penghargaan bagi siswa yang hadir tepat waktu serta memberikan tugas-tugas rumah agar materi pelajaran yang diajarkan di kelas dapat terulang kembali setelah siswa berada di rumah.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari seorang siswa atas nama Ahmad yang mengatakan:

Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), memberi saya tugas agar saya dapat dengan mudah mengingat apa yang diberikan oleh guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), kepada saya dan mendapatkan nilai yang bagus.²⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat di pahami bahwa pemberian tugas sangat efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran mengingat waktu di sekolah yang sangat terbatas dan sebagai salah satu cara agar siswa selalu belajar sehingga berpengaruh pada meningkatnya motivasi belajar yang di peroleh siswa.

KESIMPULAN

1. Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, propinsi ataupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil dan keberadaannya sangat dibutuhkan pada SD Negeri 41 Buton;
2. Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dapat memberikan motivasi belajar pada siswa pada SD Negeri 41 Buton;
3. Salah satu bentuk motivasi guru PPPK adalah memberikan penghargaan ataupun pujian kepada siswa yang mampu menjawab pertanyaan secara baik dan benar, atas pertanyaan yang diajukan oleh guru ketika pembelajaran sedang berlangsung, memberikan tugas mandiri dan lain sebagainya.

¹⁸ Siti Armila, Guru PPPK SDN 41 Buton, *Wawancara*, SDN 41 Buton 14 Desember 2022

¹⁹ Badrun, Siswa SDN 41 Buton, *Wawancara*, SDN 41 Buton, 14 Desember 2022

²⁰ Ahmad, Siswa SDN 41 Buton, *Wawancara*, SDN 41 Buton, 14 Desember 2022

SARAN-SARAN

1. Bagi lembaga pendidikan khususnya SDN 41 Buton semoga penelitian ini menjadi masukan sekaligus referensi untuk mendorong para guru yang masih berstatus guru tidak tetap atau guru honorer agar bersabar serta berupaya semoga dimasa yang akan datang terbuka kembali pendaftaran guru PPPK ataupun guru PNS;
2. Bagi siswa atau peserta didik SDN 41 Buton senantiasa termotivasi untuk belajar dengan tidak berharap pada penghargaan maupun pujian yang di berikan oleh guru di saat anda mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Beretika*, (Cet.2; Yogyakarta; Graha Guru, 2009).
- Agustinus sulistyo, Tri Putranto, *Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pengertian dan Urgensinya*, 2015
- Davis dalam Syafaruddin dan Irwan Nasution, *Manajemen Pembelajaran*, (Cet. 1; Jakarta, Quantum Teaching, 2005)
- Eko Prasoj, Jangan sampai PPPK dijadikan Alat Pendulang Suara Pemilu 2019, Seminar Manajemen PPPK, Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, 27 Mei 2015, diunduh dari <http://www.bkn.go.id/berita/prof-eko-prasoj-jangan-sampai-p3k-dijadikan-alat-pendulang-suara-pemilu-2019>.
- Mc. Donald dalam Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Cet.9; Jakarta, Bumi Aksara. 2009)
- Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Cet. 9: Jakarta; Bumi Aksara, 2009)
- , *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, (Cet. 2; Jakarta; Bumi Aksara, 2003).
- Sardiman, A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Cet.23; Jakarta, Rajawali Pers. 2016)
- Salinan Peraturan Pemerintah RI.Nomor 49 Tahun 2018, *Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja*, 2018
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2003
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Cet. 4; Jakarta, Rajawali Pers. 2011).
- Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, (Cet. 2 : Jakarta; Prenada Media Group, 2009)